



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : DIREKTORAT MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAN SAHERUDDIN
2. Jabatan : DIREKTUR GROUP
3. NHK : 427830

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.691.813.008

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.279.860.572
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 59.630.688
3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 352.321.748

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.005.850.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.850.000
2. MOBIL, HONDA ACCORD CVT TURBO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 548.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 137.945.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 259.271.222

F. HARTA LAINNYA

Rp. 352.904.121

Sub Total

Rp. 3.447.783.851

III. HUTANG

Rp. 267.608.313

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.180.175.538



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.